

INISIATIF MARKET SYSTEM DEVELOPMENT UNTUK MENDORONG EKONOMI HUTAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN

TAHUN 2025



Laporan ini disusun sebagai bagian dari Inisiatif Market Systems Development (MSD) yang diterapkan oleh Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (P.U.P.U.K) dalam konteks Perhutanan di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini bertujuan memperkuat sistem pasar, membuka akses yang lebih adil bagi masyarakat pengelola hutan, serta mendorong terciptanya mata pencarian yang berkelanjutan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan rumah tangga petani kecil. Melalui serangkaian intervensi yang bersifat fasilitatif, program ini berhasil membangun model-model kemitraan komersial yang kompetitif, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki standar mutu dan hubungan pasar di berbagai komoditas kehutanan non-kayu.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendekatan Market Systems Development (MSD) diterapkan dalam konteks Perhutanan Sosial untuk mengatasi akar permasalahan pasar yang membuat masyarakat hutan (terutama petani kecil) tetap berada dalam rantai nilai yang lemah, tidak efisien, dan tidak inklusif. Sebagai pendekatan yang menekankan fasilitasi, bukan substitusi, MSD berfokus pada pembenahan struktur pasar, peningkatan insentif pelaku, penguatan fungsi pendukung, serta terciptanya hubungan dagang yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menjadikan sistem pasar bekerja lebih baik dan menguntungkan kelompok rentan, termasuk perempuan, masyarakat miskin, dan pengelola PS.

Melalui analisis pasar yang komprehensif dan identifikasi titik perubahan sistemik, program berhasil memperkuat tata kelola KUPS dan BUMKam, membuka akses pembiayaan, memperbaiki standar mutu produk, serta membangun hubungan jangka panjang antara petani, aggregator lokal, dan off-taker skala industri atau retail. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dan kualitas produk, tetapi juga menciptakan sistem insentif yang memungkinkan keberlanjutan tanpa ketergantungan pada proyek.

Capaian lintas komoditas menunjukkan pola perubahan yang konsisten. Pada kakao (Pidie dan Jayapura), kopi (Enrekang), pala (Fakfak), vanili (Jayapura), cabe rawit (Sintang), gula aren (Poso), sereh wangi (Keerom), dan keladi (Manokwari Selatan), terbentuk model bisnis baru yang menempatkan KUPS atau BUMKam sebagai aggregator profesional yang mampu mengolah produk sesuai standar buyer. Hubungan dagang yang stabil dengan industri (mulai dari Socolatte, Olam, Kawali, PT Agri Spices, retail, hingga toko oleh-oleH) menghasilkan kepastian pasar dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani. Di beberapa daerah, pembiayaan rantai nilai berhasil masuk karena adanya struktur usaha yang lebih kredibel.

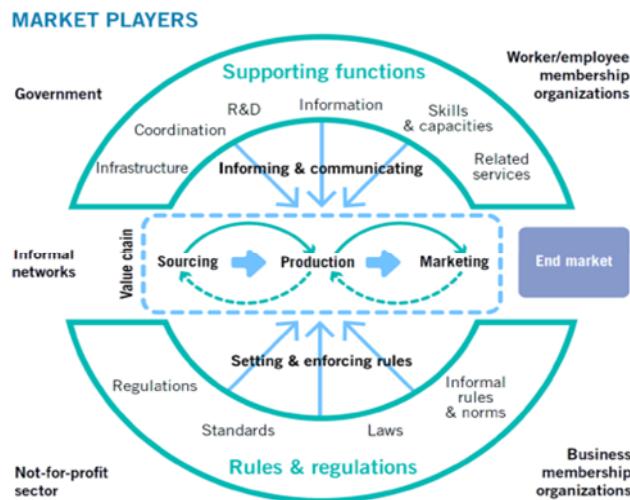
Dampak sistemik terlihat pada menyebarluasnya pengetahuan teknis dari petani penerima intervensi kepada petani lain; meningkatnya kapasitas lembaga lokal dalam tata kelola, manajemen mutu, dan pemasaran; serta munculnya "crowding-in" di mana pelaku usaha baru ikut terlibat tanpa insentif proyek. Selain itu, contoh kuat muncul dari Sintang, di mana KUPS perempuan tidak hanya menguasai rantai nilai serbuk cabai tetapi juga menyusun SOP dan SPI ramah gender yang kemudian diadopsi buyer. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi MSD dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan posisi tawar dan ruang pengambilan keputusan bagi perempuan.

Melalui pendekatan ini, Perhutanan Sosial tidak lagi berhenti pada pemberian akses kelola, tetapi bergerak menuju sistem pasar yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan KUPS, keberlanjutan hubungan dagang tanpa donor, serta institusionalisasi praktik baik di tingkat pemerintah daerah menjadi bukti bahwa MSD mampu mendorong perubahan struktural yang bertahan lama. Dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar dan intervensi yang tepat, masyarakat PS kini lebih siap terhubung dengan pasar modern dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

TENTANG MARKET SYSTEM DEVELOPMENT DAN PERHUTANAN SOSIAL

Market Systems Development (MSD) adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan dari disfungsi atau ketidakseimbangan dalam sistem pasar, sehingga pasar dapat beroperasi secara lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku, terutama kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas.

MSD juga dikenal dengan istilah Making Markets Work for the Poor (M4P) atau “*inclusive systems approach*” yaitu pendekatan pembangunan ekonomi yang dirancang untuk membuat sistem pasar bekerja lebih baik untuk masyarakat miskin atau kelompok rentan.



Sumber: Herr, Matthias; Muzira, Taprea, Value Chain Development for Decent Work: A guide for private sector initiatives, governments and development organizations / Matthias Herr and Taprea Muzira; International Labour Office, Geneva, 2009. Dikutip dari Social Security Gap In The Coffee Sector In Indonesia Report, ILO 2019.

MSD tidak hanya membantu secara langsung produksi atau distribusi, tetapi menargetkan reformasi struktural dalam “sistem pasar” yaitu keseluruhan rangkaian aktor, institusi, aturan, insentif dan interaksi antar pelaku pasar, sehingga pasar bisa menjadi inklusif, efisien, tangguh, dan berkelanjutan bagi semua termasuk kelompok miskin.

MSD memandang bahwa banyak orang miskin sebenarnya sudah berpartisipasi di pasar (sebagai pekerja, petani, konsumen, usaha kecil), tapi seringkali sistem pasar tidak bekerja adil atau efektif bagi mereka. MSD berusaha memperbaiki cara pasar berfungsi agar partisipasi mereka menghasilkan manfaat nyata.

MSD memandang bahwa banyak orang miskin sebenarnya sudah berpartisipasi di pasar (sebagai pekerja, petani, konsumen, usaha kecil), tapi seringkali sistem pasar tidak bekerja adil atau efektif bagi mereka. MSD berusaha memperbaiki cara pasar berfungsi agar partisipasi mereka menghasilkan manfaat nyata.

Prinsip & Karakteristik Utama MSD

1. Mengatasi akar penyebab, bukan sekadar gejala
Fokus pada penyebab struktural atau sistemik dari kegagalan pasar (misalnya hambatan akses, regulasi, insentif buruk, koordinasi antar pelaku), bukan hanya memberikan bantuan langsung seperti subsidi.
2. Intervensi melalui fasilitasi, bukan dominasi
Pelaku pembangunan (donor, program, NGO) bertindak sebagai fasilitator: membantu memetakan sistem pasar, membangun kemitraan, memfasilitasi perubahan insentif atau praktik, tetapi membiarkan pelaku pasar lokal (perusahaan, pemerintah, komunitas) mengambil peran utama.
3. Berorientasi pada keberlanjutan dan skala besar
Tujuan jangka panjang: perubahan sistemik yang tetap berlaku bahkan setelah intervensi / pendanaan eksternal selesai; serta dampak bagi banyak orang, bukan segelintir penerima.
4. Pemahaman mendalam terhadap kompleksitas pasar
Karena pasar adalah sistem dinamis dengan banyak aktor dan variabel, pendekatan MSD butuh analisis menyeluruh terhadap siapa pelakunya, bagaimana mereka berinteraksi, aturan formal & informal, insentif, serta hambatan akses.
5. Fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan
Karena kondisi pasar bisa berubah — misalnya muncul pelaku baru, perubahan permintaan, regulasi — maka intervensi MSD harus responsif, dengan monitoring terus menerus dan kesiapan untuk menyesuaikan strategi.

Tahapan Pelaksanaan MSD



Bagaimana pendekatan MSD diterapkan dalam konteks Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (PS) bertujuan memberikan akses legal kelola hutan kepada masyarakat melalui skema HTR, HKm, Hutan Desa, Kemitraan, dan Hutan Adat. Namun, setelah izin diberikan, tantangan terbesar justru berada pada sistem pasar yang tidak bekerja optimal bagi kelompok masyarakat PS. Di sinilah pendekatan Market Systems Development (MSD) menjadi relevan. Fokus tidak hanya pada produksi kayu/non-kayu, tetapi pada perbaikan keseluruhan sistem pasar (aktor, fungsi pendukung, dan aturan) sehingga masyarakat hutan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam banyak lokasi PS, pasar gagal bekerja dengan baik karena:

1. Akses pasar terbatas
 - Produk hutan (kopi, madu, aren, rotan, HHBK lain) dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
 - Tidak ada kontrak jangka panjang atau skema off-taker.
2. Fungsi pendukung lemah
 - Minim akses ke pembiayaan (koperasi/BUMDes lemah, tidak bankable).
 - Akses teknologi pasca-panen rendah.
 - Informasi harga tidak transparan.
3. Aturan & insentif tidak mendukung
 - Perizinan NTFP/HHBK masih rumit.
 - Koperasi pengelola PS belum kuat secara tata kelola.

MSD membantu menjawab akar masalah tersebut melalui perbaikan sistemik.

Intervensi yang dilakukan selama program

Berikut merupakan tahapan yang dilakukan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (P.U.P.U.K.) dalam menerapkan MSD pada konteks PS di Indonesia:

1. Market Assessment

Analisis sistem pasar dalam Perhutanan Sosial dilakukan dengan memetakan seluruh ekosistem yang memengaruhi rantai nilai, mulai dari produsen seperti kelompok Perhutanan Sosial atau KUPS, perantara seperti pedagang dan aggregator, hingga off-taker seperti buyer nasional dan eksportir. Selain itu, dipetakan pula fungsi-fungsi pendukung yang menentukan kelancaran pasar (termasuk akses pembiayaan, layanan pelatihan, logistik, dan sertifikasi) serta aturan dan kebijakan yang membingkai operasional sektor, seperti SK izin, tata hutan, regulasi HHBK, Perdirjen, dan Perda. Tujuan dari analisis komprehensif ini adalah mengidentifikasi akar permasalahan sistemik yang menyebabkan pasar Perhutanan Sosial tidak berjalan optimal.

2. Identifikasi Titik Perubahan Sistemik

Titik perubahan utama dalam Perhutanan Sosial meliputi berbagai aspek yang dapat mendorong perbaikan sistemik, seperti peningkatan tata kelola KUPS agar lebih transparan dan kredibel sehingga dipercaya oleh buyer, serta

peningkatan standar mutu produk melalui layanan pasca-panen yang lebih profesional. Selain itu, perlu dikembangkan akses pembiayaan mikro berbasis hasil hutan untuk mendukung modal usaha masyarakat, diikuti penerapan skema kemitraan komersial yang adil seperti *fair contract farming* antara KUPS dan pelaku usaha. Upaya ini juga harus didukung oleh penyederhanaan aturan tata niaga HHBK agar proses pemasaran produk hutan menjadi lebih efisien dan inklusif.

3. Desain Intervensi

Pendekatan MSD tidak berfokus pada pemberian alat, pembangunan pabrik, atau subsidi jangka panjang, melainkan pada intervensi yang bersifat fasilitatif dan mendorong perubahan sistemik. Upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi terbangunnya hubungan komersial jangka panjang antara KUPS dan off-taker, memperkuat penyedia layanan pelatihan lokal agar mampu menawarkan jasa yang berkelanjutan tanpa bergantung pada proyek, serta memperbaiki insentif bagi pelaku bisnis lokal sehingga mereka ter dorong untuk berpartisipasi dan “*crowd-in*” ke dalam rantai nilai Perhutanan Sosial.

4. Scaling Up

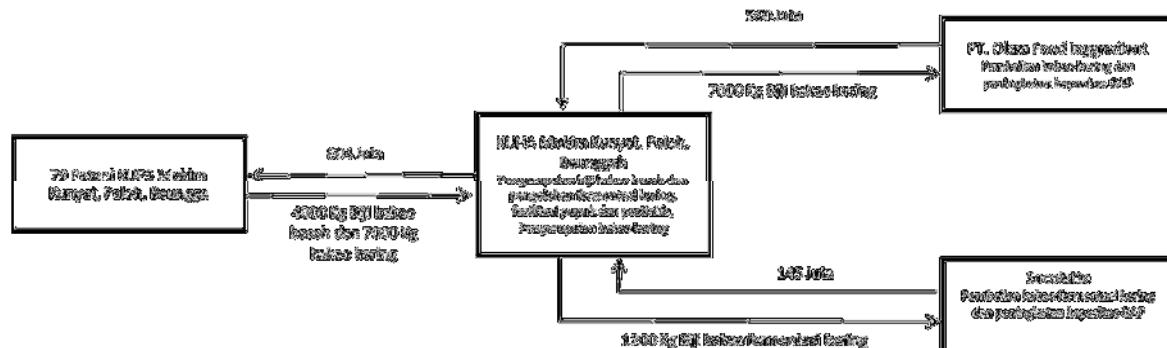
Skenario scaling dalam Perhutanan Sosial dapat dimulai dari tahap pilot, misalnya lima KUPS kopi hutan bermitra dengan satu buyer premium untuk menguji model kemitraan yang berkelanjutan. Ketika model tersebut terbukti berhasil, tahap berikutnya adalah *crowding-in*, di mana koperasi atau kelompok lain meniru pendekatan yang sama tanpa memerlukan dukungan donor. Pada fase lebih lanjut, terjadi *institutionalization*, di mana pemerintah kabupaten mulai mengadopsi praktik baik tersebut ke dalam kebijakan formal, misalnya melalui penyusunan Perup tata niaga HHBK yang mengacu pada prinsip dan model MSD.

5. Exit Strategy

Perubahan sistemik yang diharapkan bertahan dalam Perhutanan Sosial mencakup penguatan KUPS hingga menjadi lembaga yang kredibel dan *bankable*, keberlanjutan hubungan dagang di mana buyer tetap melakukan pembelian tanpa keterlibatan proyek, serta keberadaan jasa pelatihan yang dibayar oleh pasar alih-alih bergantung pada donor. Selain itu, regulasi lokal juga harus mendukung kelancaran tata niaga dan aliran produk Perhutanan Sosial sehingga seluruh sistem dapat berfungsi secara mandiri dan berkelanjutan.

INISIATIF MARKET SYSTEM DEVELOPMENT PADA SEPULUH KOMODITAS FORESTRI

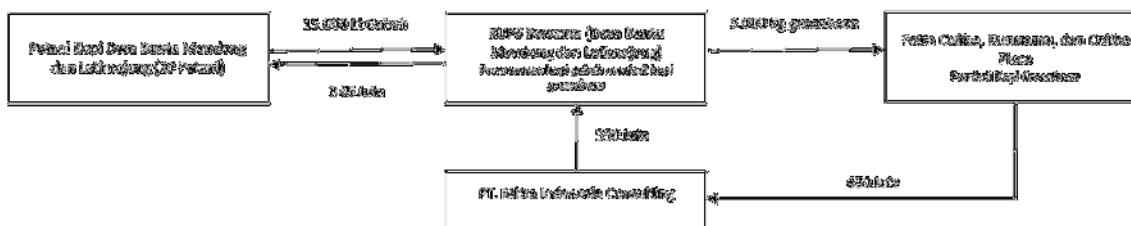
Komoditas Kakao di Kabupaten Pidie



Skema Model bisnis ini melibatkan CV. Aceh Socolatte, PT. Olam Indonesia, dan Koperasi Multi Komoditas Aceh yang akan membeli kakao fermentasi dari petani kakao di area hutan adat dan non area hutan adat melalui KUPS. KUPS bertindak sebagai agregator yang mengumpulkan kakao basah dari petani kakao dan memproses menjadi kakao fermentasi kering. Socolatte, PT. Olam Indonesia, dan Koperasi Multi Komoditas Aceh akan memberikan pelatihan kepada KUPS mengenai praktek-praktek pemrosesan kakao fermentasi kering yang baik agar dapat menghasilkan kakao fermentasi kering yang berkualitas baik. PT. Olam Indonesia juga memberikan pelatihan kepada petani kakao mengenai praktek-praktek pertanian yang baik (GAP) agar dapat menghasilkan biji kakao yang lebih banyak. Selanjutnya KUPS dan petani kakao yang mendapatkan pelatihan akan menyampaikan informasi budidaya dan standar kualitas kepada pembudidaya penerima bantuan dan non penerima bantuan. Petani kakao yang telah meningkatkan kualitas biji kakanya menjual kakao basah kepada KUPS. KUPS menjual kakao fermentasi kering yang sudah sesuai dengan standar kualitas ke Socolatte, PT. Olam Indonesia, dan Koperasi Multi Komoditas Aceh.

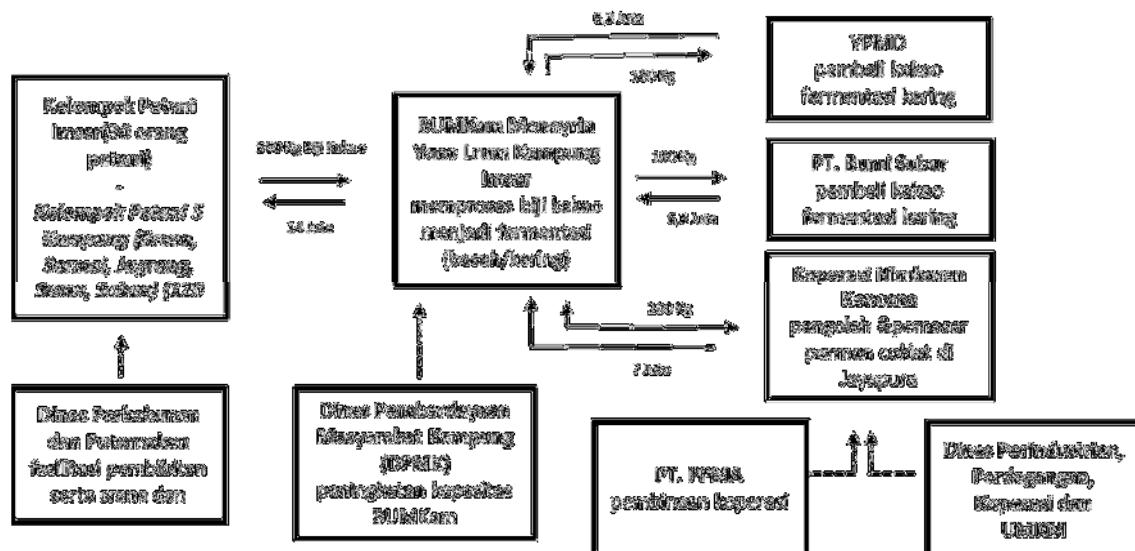
Intervensi pada komoditas kakao di Kabupaten Pidie berhasil membangun model bisnis inklusif yang melibatkan CV Aceh Socolatte, PT Olam Indonesia, dan Koperasi Multi Komoditas Aceh sebagai pembeli utama. Melalui pelatihan GAP bagi petani dan pelatihan pengolahan fermentasi bagi KUPS, kualitas biji kakao meningkat signifikan sehingga KUPS mampu memasok kakao fermentasi sesuai standar industri. Dampaknya bukan hanya peningkatan nilai jual, tetapi juga terciptanya alur rantai nilai yang lebih adil dan berkelanjutan, karena pengetahuan dan standar mutu kemudian ditularkan ke petani lain di luar penerima bantuan.

Komoditas Kopi Greenbean di Kabupaten Enrekang



Pada komoditas kopi greenbean di Enrekang, intervensi MSD membuat KUPS berkembang menjadi agregator profesional yang mampu memproses kopi gabah menjadi greenbean berkualitas. Kemitraan komersial terbentuk secara stabil dengan buyer seperti Kawali, Petta Coffee, Bururamu, dan Coffee Place. Pelatihan pascapanen untuk KUPS dan penyebaran standar kualitas kepada petani menghasilkan peningkatan mutu biji kopi secara merata. Hasil akhirnya adalah hubungan dagang yang berulang dan berkelanjutan, sekaligus peningkatan kepercayaan buyer terhadap sistem Perhutanan Sosial.

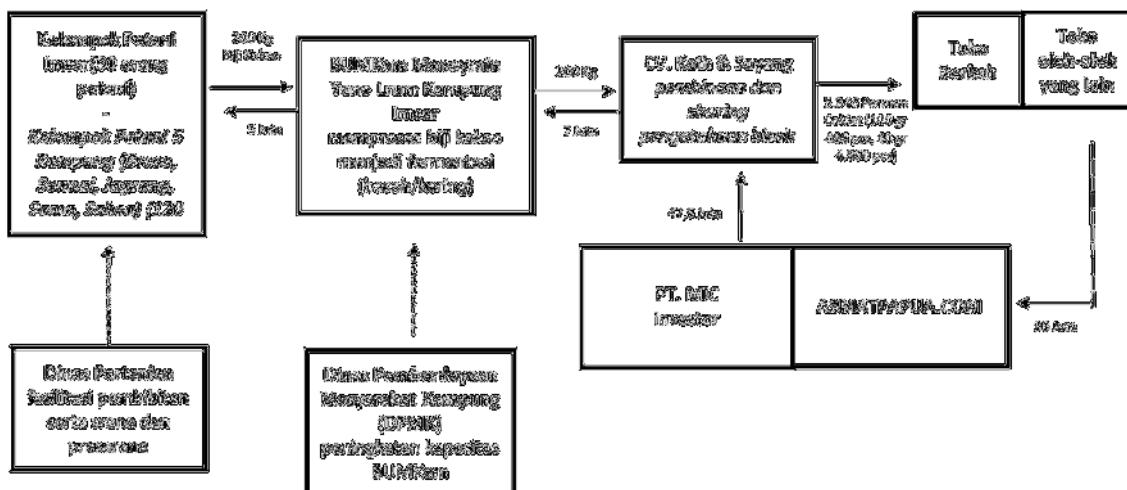
Komoditas Kakao di Kabupaten Jayapura



Model bisnis ini melibatkan YPMD, PT. Bumi Subur dan Koperasi Nimboran Kencana yang akan membeli komoditas kakao dengan jenis kakao kering fermentasi melalui BUMKam Monayrain Yano Lrum. BUMKam berndak sebagai pembeli yang mengumpulkan kakao basah/kering dari petani kemudian mengolahnya menjadi kakao kering fermentasi. Adapun lembaga pendukung Disbunnak akan memfasilitasi pembibitan dan sarana prasarana kepada para petani kakao. Sedangkan DPMK berperan dalam penguatan kapasitas BUMKam. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM dan mitra pendamping lokal Pt. PPMA berperan dalam melakukan pembinaan serta penyediaan sarana prasarna bagi koperasi.

Komoditas kakao di Kabupaten Jayapura, BUMKam Monayrain Yano Lrum mengalami transformasi penting dari sekadar kelompok kampung menjadi lembaga pengumpul sekaligus pengolah kakao fermentasi kering. Kerja sama dengan YPMD, PT Bumi Subur, dan Koperasi Nimboran Kencana memperluas akses pasar petani. Intervensi pemerintah daerah dalam bentuk pembibitan, sarana-prasarana, dan penguatan kelembagaan turut memperbaiki rantai nilai secara menyeluruh. Hal ini menjadikan BUMKam lebih berdaya dalam mengelola volume, kualitas, dan pemasaran kakao lokal.

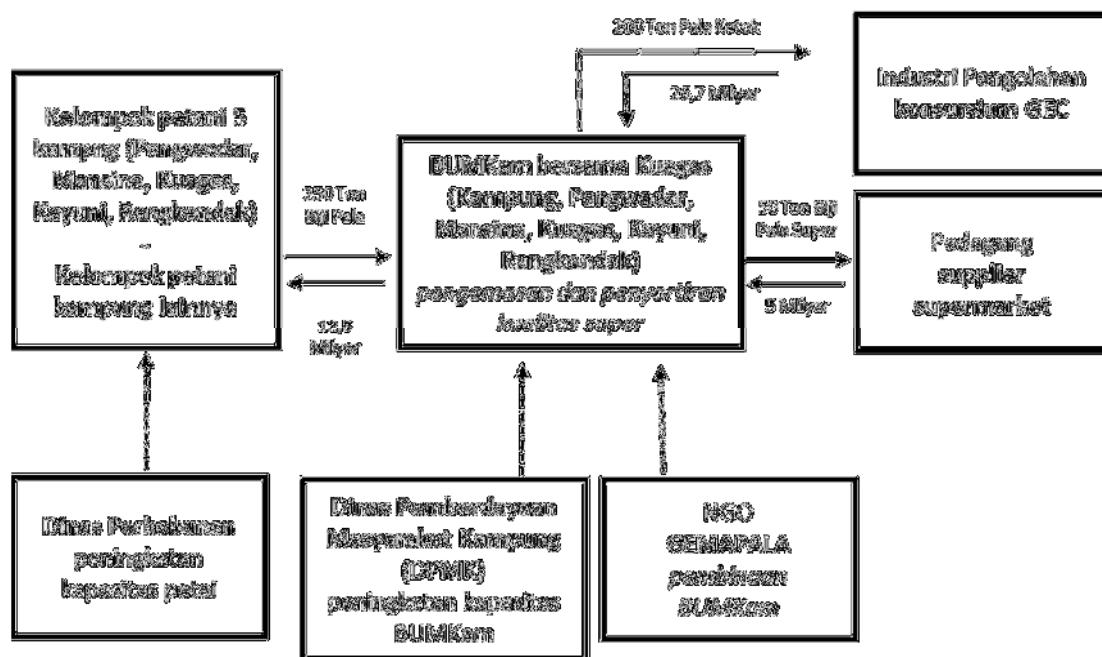
Komoditas Kakao di Kabupaten Jayapura Kerjasama dengan Mitra Swasta di Makassar



Model bisnis ini melibatkan CV. Kasih Sayang dan toko oleh-oleh di Makasar untuk mengolah dan mendistribusikan komoditas kakao melalui BUMKAM Monayrain Yano Lrum. BUMKAM bertindak sebagai pembeli yang mengumpulkan kakao dari petani. Adapun lembaga pendukung seperti PT. MIC dan ASMAT yang berperan dalam permodalan dan pemasaran. Sementara di sektor pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan lebih berperan pada pendampingan untuk para petani baik dalam hal pengadaan bibit maupun peningkatan kapasitas untuk para petani. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) berperan dalam penguatan kelembagaan BUMKAM.

Intervensi pada komoditas kakao Jayapura kemitraan Makassar berhasil membuka pasar luar daerah melalui kerja sama dengan CV Kasih Sayang dan jaringan toko oleh-oleh. BUMKAM mampu memasok kakao fermentasi yang siap diolah di Makassar, sedangkan mitra pembiayaan seperti PT MIC dan ASMAT memperkuat modal usaha dan pemasaran. Dengan intervensi teknis dari Dinas Perkebunan dan DPMK, baik petani maupun BUMKAM menjadi lebih terorganisasi dan mampu menjaga kualitas pasokan secara konsisten.

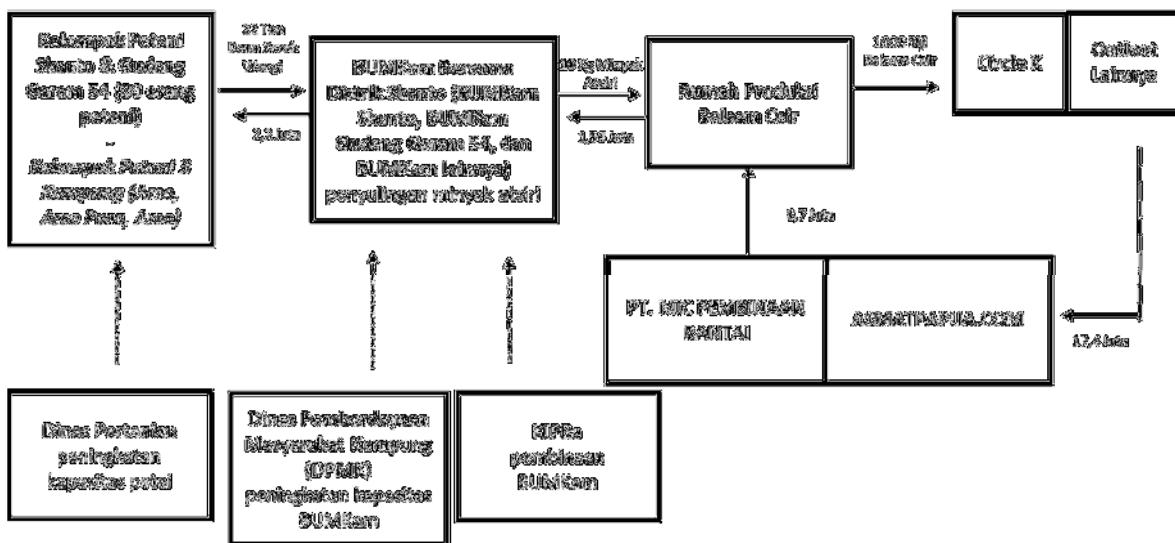
Komoditas Pala di Kabupaten Fakfak



Model bisnis ini melibatkan Konsorsium GEC dan Supplier Supermarket sebagai buyer yang akan membeli komoditas pala melalui BUMKam Bersama Kuagas. BUMKAM bertindak sebagai pembeli yang mengumpulkan pala dari petani. Adapun GEMAPALA akan berperan dalam pembinaan BUMKAM. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai aktor yang melakukan pendampingan pada petani Pala. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) berperan dalam penguatan kelembagaan BUMKAM.

Pada komoditas pala di Fakfak, terbentuk hubungan dagang antara BUMKam Bersama Kuagas dengan Konsorsium GEC dan jaringan supermarket sebagai pembeli. BUMKam mulai berfungsi sebagai aggregator yang memperkuat posisi tawar petani, sementara GEMAPALA dan DPMK meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen usaha. Dengan intervensi teknis dari Dinas Perkebunan, kualitas pala meningkat sehingga dapat diterima oleh pasar modern. Ini merupakan langkah penting dalam menghubungkan petani pala ke rantai nilai ritel formal.

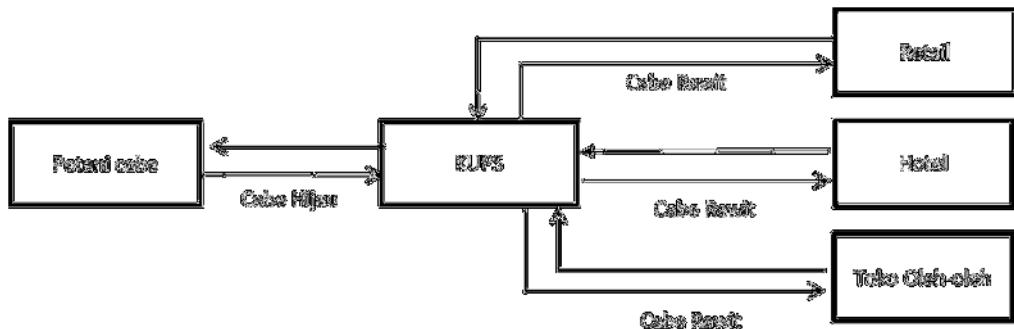
Komoditas Sereh Wangi di Kabupaten Keerom



Model bisnis ini melibatkan Rumah Produksi Balsem Cair di Makasar dan outlet mini market dalam memproduksi dan mendistribusikan minyak sereh wangi, sedangkan BUMKAM Skanto dan Gudang Garam bertindak sebagai pembeli yang mengumpulkan bahan baku sereh wangi dari petani dan mengolahnya menjadi minyak atsiri sereh wangi. Adapun lembaga pendukung seperti PT. MIC dan ASMAT yang mendukung pembiayaan rantai nilai. Dinas Pertanian berperan dalam melakukan pendampingan terhadap petani. Serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan KIPRa yang mendukung program pendampingan BUMKam.

Intervensi menghasilkan model bisnis minyak atsiri yang menghubungkan petani (BUMKam Skanto dan Gudang Garam) Rumah Produksi Balsem Cair (outlet retail). BUMKam kini mampu mengolah sereh wangi menjadi minyak atsiri, memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dibanding menjual daun segar. Pembiayaan dari PT MIC dan ASMAT menjaga kelancaran rantai pasok, sementara intervensi pemerintah dan DPMK memperkuat kapasitas teknis budidaya dan kelembagaan BUMKam.

Komoditas Cabe Rawit di Kabupaten Sintang

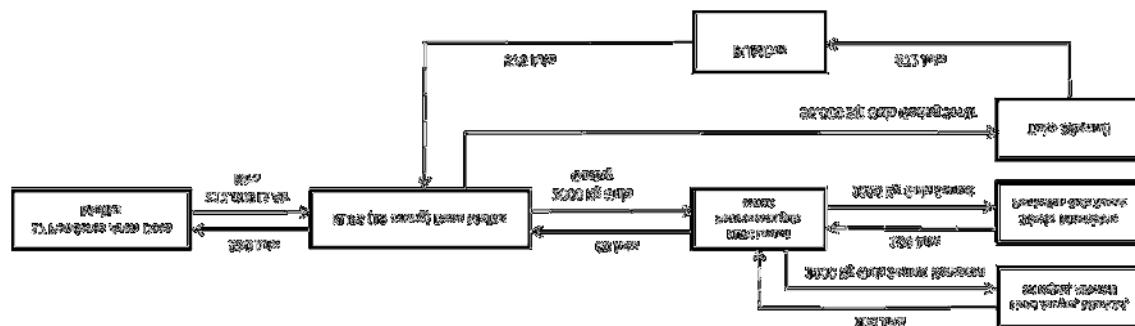


Skema Model bisnis ini melibatkan retail, hotel, dan toko oleh-oleh yang akan membeli serbuk cabe dari petani cabai di Kabupaten Sintang melalui KUPS. KUPS bertindak

sebagai aggregator yang mengumpulkan cabai kering dari petani cabai dan memproses menjadi serbuk cabai standart buyer. Retail akan memberikan pelatihan kepada KUPS mengenai praktek-praktek pemrosesan serbuk cabai agar dapat menghasilkan serbuk cabai yang berkualitas baik. Selanjutnya KUPS yang mendapatkan pelatihan akan menyampaikan informasi pengolahancabai kering kepada petani cabai perhutanan sosial. Petani cabai yang telah meningkatkan kualitas cabai keringnya menjual cabai kering kepada KUPS. KUPS menjual serbuk cabai yang sudah sesuai dengan standar kualitas ke retail, hotel, dan toko oleh-oleh.

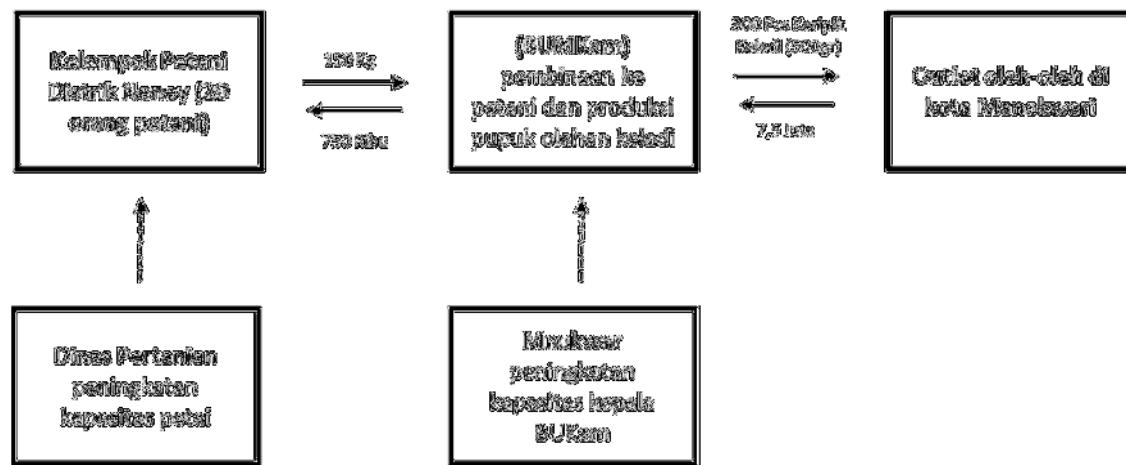
Pada komoditas cabe rawit di Sintang, capaian paling menonjol adalah terbentuknya rantai nilai serbuk cabai yang dikelola oleh KUPS perempuan. KUPS menjadi aggregator yang memproses cabai kering menjadi serbuk berkualitas standar buyer untuk dipasarkan ke retail, hotel, dan toko oleh-oleh. Keberhasilan besar lainnya adalah penyusunan SOP dan SPI ramah gender yang dibuat langsung oleh perempuan dan disetujui mitra usaha. Hal ini menciptakan proses kerja yang lebih adil, fleksibel, dan inklusif serta meningkatkan kualitas produk secara signifikan. Dampak sistemiknya tampak pada meningkatnya kepercayaan diri dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Komoditas Gula Aren di Kabupaten Poso



KUPS Lestari berkembang menjadi aggregator yang dapat memproduksi gula semut dan gula aren gasing sesuai standar hotel dan retail lokal. Pelatihan pengolahan bersih meningkatkan kualitas produk, sementara petani memperoleh manfaat melalui harga jual yang lebih baik. Keberadaan buyer seperti Hotel Ancyra, Enkai Gobel, dan Toko Sikamali memastikan pasar yang stabil, sehingga insentif bagi petani untuk memproduksi gula aren berkualitas menjadi lebih kuat.

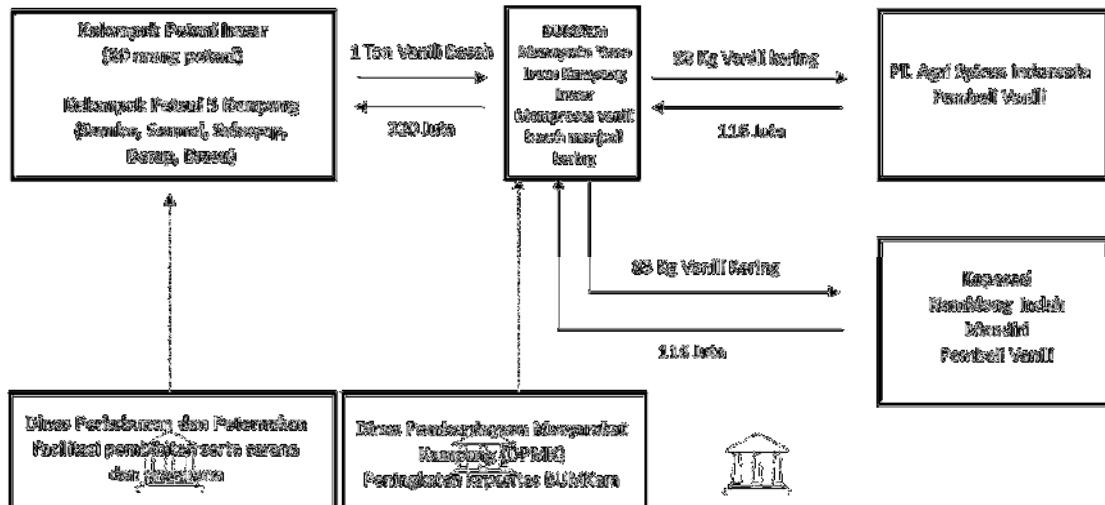
Komoditas Keladi di Kabupaten Manokwari Selatan



Model bisnis ini melibatkan toko oleh-oleh di Kota manokwari sebagai buyer yang akan membeli keripik keladi, sedangkan BUMKam Kampung Neney bertindak sebagai pembeli yang mengumpulkan bahan baku keladi dari petani dan mengolahnya menjadi keripik keladi. Adapun lembaga pendukung seperti Dinas Pertanian dalam melakukan pendampingan terhadap petani, Perkumpulan Mnukwar membiayai sarana & prasarana terutama permodalan dan pembinaan BUMKam melalui program PAPeDA.

Intervensi pada komoditas keladi di Manokwari Selatan memungkinkan BUMKam Kampung Neney mengolah keladi menjadi keripik untuk dijual di toko oleh-oleh. Perubahan ini meningkatkan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Dukungan permodalan dari Perkumpulan Mnukwar dan intervensi teknis dari Dinas Pertanian membuat BUMKam lebih siap dalam menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan.

Komoditas Vanili di Kabupaten Jayapura

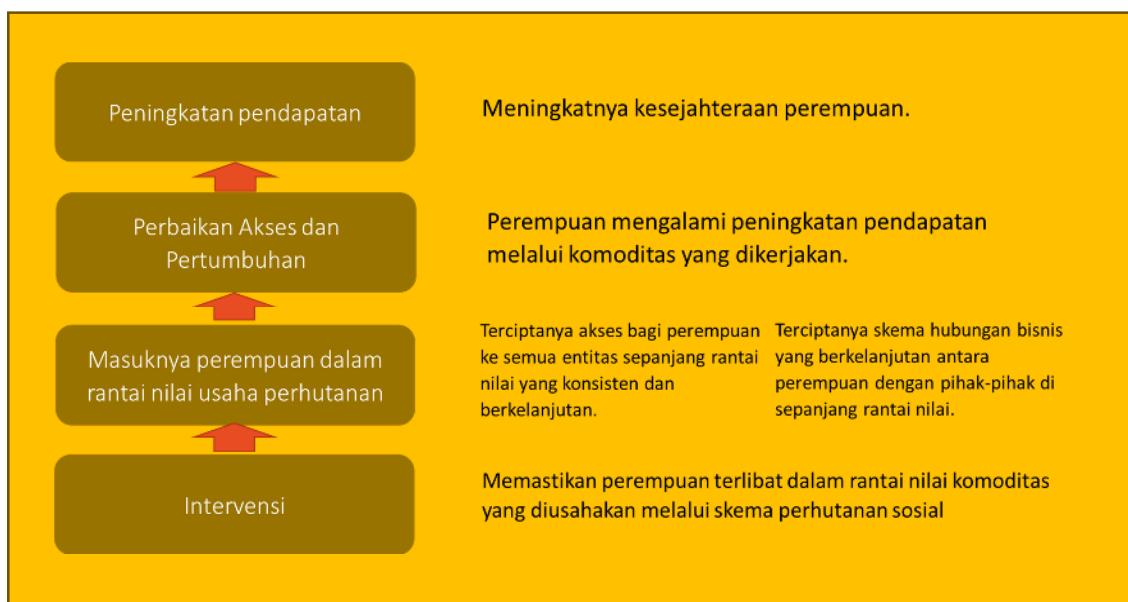


Model bisnis ini melibatkan Koperasi Namblong Indah Mandiri (NCBE) dan PT. Agri Spices Indonesia sebagai buyer yang akan membeli komoditas vanili melalui BUMKam Monayrain Yano Lrum. BUMKAM bertindak sebagai pembeli yang mengumpulkan vanili dari petani. Adapun Pt PPMA akan berperan dalam pembinaan koperasi. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai aktor yang melakukan pendampingan pada petani vanili serta pengadaan bibit. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) berperan dalam penguatan kelembagaan BUMKAM.

model bisnis yang melibatkan BUMKam Monayrain Yano Lrum, Koperasi Namblong Indah Mandiri (NCBE), dan PT Agri Spices Indonesia menghasilkan rantai nilai yang terstruktur dari petani hingga industri. BUMKam berhasil mengolah vanili basah menjadi vanili kering berkualitas, dengan transaksi bernilai tinggi (misalnya 1 ton vanili basah menjadi 83 kg vanili kering). Intervensi Dinas Perkebunan dan DPMK memperkuat budidaya dan kelembagaan, sementara Pt PPMA mendampingi koperasi. Kombinasi ini membuat rantai nilai vanili lebih transparan, teratur, dan menguntungkan petani.

MENDORONG MARKET SYSTEM DEVELOPMENT YANG BERKEADILAN MELALUI PENGUATAN PERAN PEREMPUAN

PUPUK memandang pelibatan perempuan sebagai elemen kunci dalam mewujudkan sistem pasar yang lebih inklusif dan berkeadilan. Intervensi yang dilakukan tidak hanya bertujuan memastikan perempuan hadir dalam setiap tahapan rantai nilai komoditas Perhutanan Sosial, tetapi juga membuka akses mereka terhadap berbagai aktor dan peluang usaha secara konsisten dan berkelanjutan. Ketika perempuan memperoleh ruang yang setara dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran, terbentuk pula hubungan bisnis yang lebih stabil antara perempuan dan para pelaku usaha di sepanjang rantai nilai.



Keterlibatan yang semakin kuat ini mendorong perbaikan akses terhadap pengetahuan, teknologi, jejaring, serta kesempatan ekonomi, sehingga perempuan dapat mengalami pertumbuhan kapasitas sekaligus peningkatan pendapatan dari komoditas yang mereka kerjakan. Pada akhirnya, rangkaian perubahan tersebut membawa dampak yang lebih luas, yaitu meningkatnya kesejahteraan perempuan dan penguatan posisi mereka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga maupun kelembagaan usaha di tingkat komunitas. Dengan demikian, pelibatan perempuan bukan hanya isu inklusi, tetapi menjadi strategi penting dalam memperkuat keberlanjutan sistem pasar Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Kebijakan

ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, tetapi juga turut mendukung pelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan pangan melalui praktik wanatani (agroforestry), serta menciptakan model pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Studi Kementerian LHK dan mitra menunjukkan bahwa kelompok hutan yang melibatkan perempuan berpotensi lebih inovatif dan berkelanjutan. Namun, banyak kelompok pengelola hutan (KUPS, LMDH, LPHD) masih didominasi laki-laki, sehingga suara perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tidak terdengar. Padahal perempuan yang kehilangan akses hutan lebih rentan jatuh miskin dan ter dorong ke pekerjaan informal dengan risiko tinggi, termasuk perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang ini memberikan kerangka dasar tentang pengelolaan sumber daya hutan, termasuk konsep perhutanan sosial. Pasal 68 mengamanatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk perempuan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Pelibatan perempuan sering dikaitkan dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkeadilan.

Selain itu juga ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 telah memberikan kesempatan bagi lebih banyak kelompok perhutanan sosial untuk melibatkan perempuan dalam badan pengelolaan hutan. Pasal 10 poin (5) dan Pasal 21 poin (8) menyatakan bahwa penerima manfaat adalah anggota desa setempat: (a) satu rumah tangga diwakili oleh satu orang, memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan

Inisiatif Peran Perempuan pada Komoditas Kopi Greenbean

Perempuan berperan sejak tahap paling awal yaitu dalam pemilihan lokasi dan lahan, di mana mereka turut mengidentifikasi area tanam yang sesuai melalui pengetahuan lokal mengenai kondisi tanah dan iklim. Selanjutnya, perempuan terlibat dalam pemilihan varietas unggul, memastikan bibit berkualitas, bersertifikat, dan melakukan uji coba varietas. Pada tahap pembibitan, perempuan mengambil peran besar dalam persemaian, penyiraman, dan perawatan bibit di polybag, sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Dalam tahap penanaman, perempuan membantu mengatur jarak tanam serta menanam pohon penaung untuk menjaga kelembapan. Pada fase pemeliharaan, mereka sering bergotong royong dalam kegiatan pemangkasan, peremajaan, penyirangan gulma, pemupukan, dan pengendalian hama secara ramah lingkungan. Ketika masuk ke tahap pemanenan, ketelitian perempuan sangat diperlukan, terutama dalam panen selektif (petik merah) sehingga kualitas buah kopi terjaga.

Setelah panen, perempuan melanjutkan perannya dalam sortasi buah kopi dengan mengelompokkan buah berdasarkan warna, ukuran, dan kondisi untuk memastikan hanya buah berkualitas yang diproses lebih lanjut. Pada proses produksi pascapanen, perempuan mengerjakan metode seperti natural process yang meningkatkan nilai

tambah dan kualitas greenbean. Mereka juga melakukan sortasi biji kopi, baik secara manual maupun menggunakan mesin, berdasarkan ukuran, berat, dan cacat.

Pada tahap berikutnya yaitu klasifikasi grade kopi, perempuan dapat menguasai keterampilan grading sehingga hasil kelompok memenuhi standar mutu pasar. Terakhir, dalam penyimpanan, perempuan memastikan biji kopi disimpan sesuai standar, mulai dari penggunaan karung goni hingga menjaga kondisi gudang yang kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Seluruh rangkaian ini menunjukkan peran penting perempuan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan produksi kopi.

Inisiatif Peran Perempuan pada Komoditas Cabe Rawit

Pelibatan perempuan penting untuk meningkatkan pendapatan, memperluas akses ekonomi, serta memastikan keterlibatan yang konsisten di seluruh mata rantai usaha kehutanan. Intervensi diarahkan untuk menciptakan hubungan bisnis berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Contoh implementasi dijelaskan melalui rantai nilai serbuk cabai di Sintang, mulai dari petani, KUPS perempuan, pedagang pengumpul, pengecer, hingga konsumen. Faktor pendukung seperti standar kualitas, peraturan perdagangan, dan hukum informal menjadi bagian dari ekosistem nilai tersebut. Salah satu inisiatif penting adalah workshop penyusunan SOP produksi dan SPI yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini bertujuan agar SOP sesuai dengan kondisi kerja perempuan, lebih fleksibel, dan ramah gender, namun tetap memenuhi standar kualitas dari mitra usaha (Kalara Borneo). Dampaknya adalah terciptanya proses kerja yang lebih adil, lingkungan kerja yang inklusif, meningkatnya partisipasi perempuan dalam keputusan, serta berkurangnya konflik internal.